

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BUKITTINGGI
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

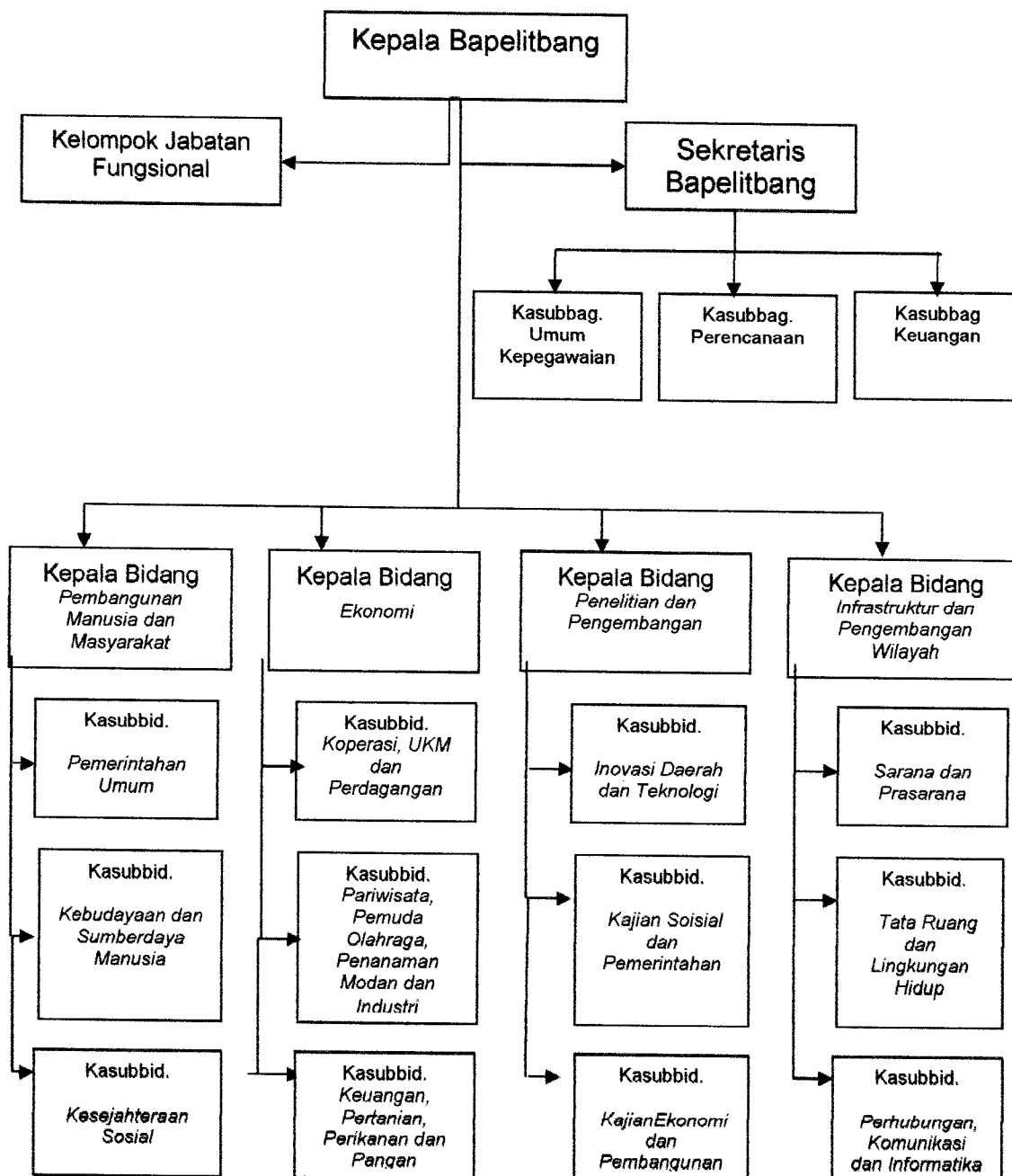
Sesuai Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi serta Peraturan Walikota Bukittinggi No. 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (BAPELITBANG) Kota Bukittinggi bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah diubah menjadi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota di Bidang Perencana Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Telah ditegaskan bahwa Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan, dimana dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan.
2. Pelaksana Kebijakan Teknis bidang perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan
3. Pelaksana Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan Administrasi Badan dan Pelaksana Tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Bapelitbang.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan dibantu oleh Sekretaris serta 4 (empat) Bidang yang membantu menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan. Struktur Organisasi Bapelitbang Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Bapelitbang Kota Bukittinggi



1.3 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2018 meliputi Rencana Strategis Bapelitbang Tahun 2016 - 2021.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menjelaskan pencapaian kinerja Bapelitbang dikaitkan dengan pertanggungjawaban atas sasaran strategis untuk Tahun 2018 dengan analisis kinerja meliputi:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Menjelaskan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BAPELITBANG Tahun 2018 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di depan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan kinerja juga memberikan target (quantitative objectives) tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan Kinerja tersebut meliputi penetapan visi/misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam tahun 2018 telah ditetapkan rencana strategis dan target kinerja.

2.1 RENCANA STRATEGIS BAPELITBANG TAHUN 2016-2021

Langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan menyusun suatu perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, Bapelitbang Kota Bukittinggi lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam hal ini periode Tahun 2016 – 2021 sesuai dengan periode RPJMD Kepala Daerah. Proses inilah yang akan menghasilkan Rencana Strategi (Renstra) instansi pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Stratejik, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan diformasikannya tujuan strategis dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi untuk mengukur sejauh mana

visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur, rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Tujuan adalah sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun . Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis.
- Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.
- Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.
- Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang ditetapkan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan, atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran.

Berdasarkan visi dan misi diatas telah ditetapkan 4 (empat) tujuan , 5 (lima) sasaran.

a. Tujuan :

1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif
2. Peningkatan kualitas dokumen Perencanaan
3. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbang dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah
4. Peningkatan kualitas pengelola SAKIP Bapelitbang

b. Sasaran :

Sasaran strategis Bapelitbang merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun dan dialokasikan dalam 5 periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Renja). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 tahun.

Sasaran strategis Bapelitbang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Bapelitbang dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Bapelitbang serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga tercapai.

Sasaran dan Program Bapelitbang Tahun 2018 dijabarkan sebagai berikut:

TUJUAN 1: Terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif

untuk mencapai tujuan ini dijabarkan kedalam sasaran:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.	- Persentase usulan masyarakat yang diakomodir melalui Musrenbang pada Dokumen Perencanaan Jangka Pendek	100%
		- Persentase usulan masyarakat yang diakomodir pada Dokumen perencanaan Jangka Menengah	100%
		- Persentase usulan masyarakat yang diakomodir pada Dokumen Perencanaan Jangka Panjang	100%

TUJUAN 2: Peningkatan kualitas dokumen Perencanaan

untuk mencapai tujuan ini dijabarkan kedalam sasaran:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan	- Keselarasan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek	100%
		- Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Propinsi Daerah Tetangga dan Nasional	100%
2	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	- Persentase ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan	90%

TUJUAN 3: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah

untuk mencapai tujuan ini dijabarkan kedalam sasaran:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan	- Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam Pengambilan kebijakan pembangunan Daerah	20

TUJUAN 4: Peningkatan kualitas pengelolaan SAKIP Bapelitbang

untuk mencapai tujuan ini dijabarkan kedalam sasaran:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya Nilai SAKIP BAPELITBANG	- Nilai Evaluasi AKIP	B

2.2 PERJANJIAN KINERJA BAPELITBANG

Perjanjian Kinerja Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2018 dijabarkan kedalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Bapelitbang Tahun 2018

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir melalui Musrenbang pada Dokumen Perencanaan Jangka Pendek	100%	Penyusunan Rancangan Dan Penetaan RKPD Kota Bukittinggi	74.886.500
				Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	56.276.940
				Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi 2018	46.894.500
				Monitoring Dan Evaluasi RKPD Kota Bukittinggi	36.713.660
				Monitoring Dan Evaluasi Pokok-Pokok Pikiran Dprd	32.486.000
				Evaluasi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021	478.000
2	Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir pada Dokumen perencanaan Jangka Menengah	100%	Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Daerah Tahun 2018-2021	86.237.500
				Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif	125.464.500
				Penyusunan Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Bukittinggi	169.062.850
				Penyusunan Revisi RPIPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2021	156.421.820
				Koordinasi Pengelolaan DAK Tahun 2018	61.859.000
				Review Dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi	40.598.450
				Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase Dan Sanitasi Perkotaan	77.729.500

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
3	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Keselarsan Dokumen Perencanaan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Propinsi dan Daerah Tetangga	100%	Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	64.374.500
				Koordinasi Pengelolaan Data AMPL Berbasis Rumah Tangga	60.291.000
				Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi	29.257.400
				Koordinasi Bidang Perhubungan Komunikasi Dan Informatika	24.169.000
				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	127.117.620
				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	73.013.500
				Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	127.110.700
				Koordinasi Dan Pendampingan Program Penataan Dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP)	22.435.500
				Penunjang Operasional Komisi Irigasi Kota Bukittinggi	16.930.450
				Fasilitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah	170.283.850
				Koordinasi Dan Pembinaan Kota Sehat	116.766.300
				Koordinasi Pengurusutamakan Gender (PUG) Kota Bukittinggi	57.832.050
				Penyusunan E Data Base Perencanaan Pembangunan Kota Bukittinggi Berbasis GIS	2.120.000
				Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (E-Planning)	62.320.500
				Updating Data Website Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dan Forum Data	142.638.250
				Penyusunan Kalender Penyelenggaraan Pemerintah	2.847.000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
4	Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam Pengambilan kebijakan pembangunan Daerah	20	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian Dan Pengembangan	153.806.400
5	Meningkatnya Nilai SAKIP BAPELITBANG	Nilai Evaluasi AKIP	B		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Bapelitbang merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan selama tahun 2018 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan tahun 2018. Dalam bab ini juga akan disajikan Akuntabilitas Keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2018.

3.1 CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2018 dititik beratkan pada pencapaian kinerja sasaran yang merupakan hasil dan upaya yang dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang diperlukan sebagai sarana/ alat untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Bapelitbang Tahun 2018. Pada Perjanjian Kinerja telah dirumuskan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran yang didukung oleh 10 (sepuluh) program dan 47 kegiatan. Analisis dan evaluasi kinerja terhadap sasaran diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak berhasilan kinerja sebagai bahan pengambil keputusan manajemen Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan khususnya dan Pemerintah Kota Bukittinggi pada umumnya untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi pada periode berikutnya.

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI TAHUN INI	CAPAIAN
1	Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam dokumen perencanaan pembangunan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir melalui Musrenbang pada Dokumen Perencanaan Jangka Pendek	100%	100%	100%
		Persentase usulan masyarakat yang diakomodir pada Dokumen perencanaan Jangka Menengah	100%	90%	90%
		Persentase usulan masyarakat yang diakomodir pada Dokumen Perencanaan Jangka Panjang	100%	90%	90%
2	Terwujudnya sinergitas Dokumen perencanaan pembangunan	Keselarasan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek	100%	90%	90%
		Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Propinsi, Daerah Tetangga dan Nasional	100%	100%	100%
3	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan	90%	90%	100%
4	Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam Pengambilan kebijakan pembangunan Daerah	20	60%	60%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapelitbang	Nilai Evaluasi AKIP	B	BB	100%

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran dapat diketahui dari indikator kinerja sasaran yang dicapai dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dikali 100%.

Dari table diatas dapat terlihat bahwa untuk mencapai 5 sasaran Bapelitbang ditetapkan dengan 8 indikator sasaran. Dari 8 (delapan) indikator tersebut, yang mencapai 100% ada 3 indikator dan sisanya pencapaian nya 90%. Capaian indicator tersebut didukung

juga dengan program dan kegiatan, terutama kegiatan dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Pada Tahun 2018 telah disusun dokumen perencanaan sebanyak 9 (sembilan) dokumen perencanaan yaitu:

1. Penyusunan Rancangan RKPD Kota Bukittinggi
2. Penyusunan Kalender Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2018
3. Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi
4. Penyusunan Revisi RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2021
5. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif
6. Review Dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi
7. Penyusunan Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Bukittinggi
8. Penyusunan Rencana Induk Kelitbang Daerah Tahun 2018-2021
9. Penguatan Inovasi Daerah

Semua dokumen perencanaan tersebut dapat disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu. Regulasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut secara teknis adalah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen perencanaan yang disusun pada tingkat kota pada tahun 2018 adalah dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. Disamping itu dokumen perencanaan tahunan (RKPD) juga merupakan bahan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018 yang nantinya juga merupakan pedoman dalam menyusun APBD pada tahun berikutnya.

3.1.2 Analisis Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2016

Realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 dan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2016 s/d 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian		
			2018	2017	2016
1	Perencanaan pembangunan telah disusun secara prosedural.	Persentase Dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu.	-		100
2	Perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terintegrasi	Persentase Perencanaan pembangunan yang disusun selaras dengan dengan dokumen lainnya.	-		100
3	Validasi dan akurasi data dan informasi	Persentase jumlah dan jenis data yang di Up Date.	-		100
4	Cakupan data dan informasi melingkupi seluruh sector	Persentase Ketersediaan data pembangunan yang dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan.	-		100
5	Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir melalui Musrenbang pada Dokumen Perencanaan Jangka Pendek	100%	90%	
		Persentase usulan masyarakat yang diakomodir pada Dokumen perencanaan Jangka Menengah	90%	90%	
		Persentase usulan masyarakat yang diakomodir pada Dokumen Perencanaan Jangka Panjang	90%	90%	
6	Terwujudnya sinergitas Dokumen perencanaan pembangunan	Keselarasn Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek	90%	80%	
		Keselarasn Dokumen Perencanaan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Propinsi, Daerah Tetangga dan Nasional	100%	80%	
7	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan	100%	80%	
8	Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam Pengambilan kebijakan pembangunan Daerah	60%	60%	
9	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapelitbang	Nilai Evaluasi AKIP	BB	B	-

Sasaran strategis pada Tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017 terjadi peningkatan capaian pada 5 indikator sedangkan 3 indikator capaian tetap sama dengan tahun 2017, hal ini memperlihatkan kinerja Bapelitbang yang semakin baik. Dan pelaksanaan program kegiatan dilakukan tepat waktu.

3.1.3 Analisis Realisasi Kinerja s/d Tahun 2018 dibandingkan dengan Target Kinerja yang ada pada Renstra

Realisasi Kinerja Tahun 2018 dibandingkan dengan target kinerja yang ada pada Renstra Bapelitbang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Target Kinerja Sasaran Strategis Pada Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				
		2014	2015	2016	2017	2018
Perencanaan pembangunan telah disusun secara prosedural.	Persentase Dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu.	100 %	100 %	100 %	-	
Perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terintegrasi	Persentase Perencanaan pembangunan yang disusun selaras dengan dengan dokumen lainnya.	100 %	100 %	100 %	-	
Validasi dan akurasi data dan informasi	Persentase jumlah dan jenis data yang di Up Date.	80%	90%	90%	-	
Cakupan data dan informasi melingkupi seluruh sector	Persentase Ketersediaan data pembangunan yang dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan.	80%	90%	80%		
Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir melalui Musrenbang pada Dokumen Perencanaan Jangka Pendek	-	-	-	90%	90%
	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir pada Dokumen perencanaan Jangka Menengah				90%	90%
	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir pada Dokumen Perencanaan Jangka Panjang				90%	90%
Terwujudnya sinergitas Dokumen perencanaan pembangunan	Keselarasan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek	-	-	-	90%	90%
	Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Propinsi Daerah Tetangga dan Nasional				90%	100%
Meningkatnya ketersediaan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan	-	-	-	100%	100%
Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam Pengambilan kebijakan pembangunan Daerah	-	-	-	15	60%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapelitbang	Nilai Evaluasi AKIP	-	-	-	C	BB

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat daerah Kota Bukittinggi dan dijabarkan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan telah dilakukan revisi terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 - 2021, sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi Nomoir 188.45.13/28/2017 tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021. Dengan demikian maka penyusunan LAKIP Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2018 disusun mengacu pada Renstra Bapelitbang yang telah dilakukan perubahan dengan penyempurnaan pada Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran yang lebih spesifik dengan tahun sebelumnya sebagaimana yang tercantum pada Tabel 3.3 di atas.

3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2018 terdapat beberapa kendala dalam mewujudkan capaian kinerja sasaran, hal tersebut bukanlah merupakan kelalaian, namun karena adanya perubahan beberapa regulasi dan juga dalam prosesnya terdapat kendala-kendala yang tidak dapat dielakkan. Diantara kendala tersebut adalah kurangnya alokasi anggaran yang mendukung terhadap pencapaian sasaran.

Keterbatasan anggaran, memang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran, namun dengan anggaran yang tersedia, pencapaian sasaran Bapelitbang tetap dimaksimalkan secara output pencapaian.

3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bapelitbang Kota Bukittinggi didukung oleh ketersediaan Sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya sarana prasarana kantor. Pada tahun 2018 personil Bapelitbang berjumlah 35 orang dengan 21 pejabat struktural yang dipimpin oleh seorang Kepala Bapelitbang, Sekretaris dan 4 Kepala Bidang dan 15 Kasubbag dan Kasubbid serta 14 fungsional Umum. Dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Bapelitbang dimana ketersediaan fungsional umum sangat sedikit sekali, untuk setiap pejabat struktural eselon IV hanya terdapat 1 orang fungsional umum bahkan ada yang tidak memiliki fungsional umum hal ini yang menyebabkan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan tepat waktu sangat kewalahan sehingga Bapelitbang sangat sering melaksanakan

lembur-lembur diluar jam kantor untuk mengejar penyelesaian kegiatan sesuai waktu yang ditentukan.

Ketersediaan sumberdaya sarana prasarana kantor Bapelitbang sudah cukup baik, baik itu ketersediaan peralatan maupun perlengkapan kantor yang sangat berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan dan pencapaian target kinerja Bapelitbang secara umum.

3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada tahun 2018 Bapelitbang menyelenggarakan Urusan Perencanaan Pembangunan yang didukung oleh 10 program dengan 47 kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan pernyataan kinerja dinyatakan dengan predikat sebagai berikut :

Tabel 3.4

Predikat Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

NO	KLASIFIKASI PENILAIAN	PREDIKAT	CAPAIAN KINERJA SASARAN
1	100 %	Sangat Baik	4
2	85 % s/d < 100 %	Baik	2
3	70 % s/d < 85 %	Sedang	-
4	0 % s/d < 70 %	Kurang Baik	-

5 (lima) sasaran strategis ditentukan oleh capaian delapan indikator sasaran strategis yang diukur dengan indikator kinerja utama masing-masing indikator. Dari delapan indikator tersebut 3 indikator berpredikat sangat baik karena memperoleh capaian kinerja 100% sedangkan 5 indikator berpredikat baik dengan capaian kinerja sasaran 90%. Penjabaran lebih lanjut kondisi pencapaian indikator sasaran diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Predikat **Sangat Baik** , dicapai oleh indikator :

Persentase perencanaan pembangunan yang disusun selaras dengan dokumen lainnya dengan Indikator Sasaran:

1. Persentase usulan masyarakat yang diakomodir melalui Musrenbang pada Dokumen Perencanaan Jangka Menengah. Yang didukung oleh kegiatan :

- Evaluasi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021

- Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Daerah Tahun 2018-2021
 - Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif
 - Penyusunan Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Bukittinggi
2. Persentase usulan masyarakat yang diakomodir pada Dokumen Perencanaan Jangka Panjang. Yang didukung oleh kegiatan :
- Penyusunan Revisi RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2021
3. Keselarasan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek. Yang didukung oleh kegiatan :
- Koordinasi Pengelolaan DAK Tahun 2018
 - Review Dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi
 - Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase Dan Sanitasi Perkotaan
 - Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
 - Koordinasi Pengelolaan Data AMPL Berbasis Rumah Tangga
 - Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi
 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
 - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur
4. Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam Pengambilan kebijakan pembangunan Daerah. Yang didukung oleh kegiatan :
- Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian Dan Pengembangan
 - Penguatan Inovasi Daerah
- b. Predikat **Baik** ($85\% \leq 100\%$) dicapai oleh indikator:

Persentase perencanaan pembangunan yang disusun selaras dengan dokumen lainnya dengan Indikator Sasaran:

1. Persentase usulan masyarakat yang diakomodir melalui Musrenbang pada Dokumen Perencanaan Jangka Pendek. Yang didukung oleh kegiatan :
- Penyusunan Rancangan Dan Penetaan RKPD Kota Bukittinggi
 - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
 - Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi 2018
 - Monitoring Dan Evaluasi RKPD Kota Bukittinggi
 - Monitoring Dan Evaluasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD

2. Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Propinsi dan Daerah Tetangga. Yang didukung oleh kegiatan :

- Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
- Koordinasi Dan Pendampingan Program Penataan Dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP)
- Penunjang Operasional Komisi Irigasi Kota Bukittinggi
- Fasilitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah
- Koordinasi Dan Pembinaan Kota Sehat
- Koordinasi Pengurusutamakan Gender (PUG) Kota Bukittinggi

3. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi dalam penyusunan yang didukung oleh kegiatan :

- Penyusunan Kalender Penyelenggaraan Pemerintah
- Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (E-Planning)
- Updating Data Website Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dan Forum Data
- Penyusunan E Data Base Perencanaan Pembangunan Kota Bukittinggi Berbasis GIS

3.2 REALISASI KEUANGAN

Untuk mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi Bapelitbang didukung oleh pendanaan baik berupa Belanja Pegawai maupun belanja penyelenggaraan tugas dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Bukittinggi tahun 2018. Rincian anggaran belanja dan realisasinya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.5
Rincian Belanja dan Realisasinya

Kode Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	Kurang/Lebih	%
5.	Belanja Daerah	5.981.504.412,00	4.986.379.015,00	(995.125.397,00)	83,36
5.1	Belanja Tidak Langsung	2.337.467.412,00	2.299.031.685,00	(38.435.727,00)	98,35
5.1.1	Belanja Pegawai	2.337.467.412,00	2.299.031.685,00	(38.435.727,00)	98,35
5.2	Belanja Langsung	3.644.037.000,00	2.687.347.330,00	(956.689.670,00)	73,74
5.2.1	Belanja Pegawai	94.950.000,00	75.469.500,00	(19.480.500,00)	79,48
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	3.290.187.000,00	2.357.844.830,00	(932.342.170,00)	71,66
5.2.3	Belanja Modal	258.900.000,00	254.033.000,00	(4.867.000,00)	98,12

Dari tabel diatas terlihat bahwasanya Bapelitbang merupakan SKPD yang tidak memiliki sumber pendapatan yang bersumber dari pajak maupun retribusi. Pada tahun 2018 ini Bapelitbang mengelola Anggaran seluruhnya sebesar Rp5.981.504.412,00 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat ribu empat ratus dua belas rupiah) dan terealisasi sebesar Rp4.986.379.015,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima belas rupiah) dengan capaian keuangan 83,36%. Rincian belanja Bapelitbang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak langsung merupakan belanja Pegawai berupa pembayaran gaji pegawai, tunjangan beban kerja, tunjangan daerah dan uang makan yang diberikan kepada pegawai Bapelitbang setiap bulannya. Belanja tidak langsung yang dikelola Bapelitbang adalah sebesar **Rp2.337.467.412,00** dengan realisasi sebesar **Rp2.299.031.685,00** dan capaian kinerja keuangan yang sangat baik yaitu sebesar **98,35%**

2. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja Bapelitbang yang dikelola untuk penyelenggaraan program dan kegiatan dialokasikan sebesar **Rp3.644.037.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp2.687.347.330,00** dengan capaian kinerja keuangan yang cukup baik yaitu sebesar **73,74 %** Belanja langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa serta Belanja Modal.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun oleh setiap SKPD guna mempertanggungjawabkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

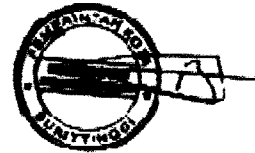
1. Sasaran strategis Bapelitbang yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2018 sebanyak empat sasaran strategis telah terlaksana dengan sangat baik dengan capaian kinerja 100% yaitu 4 sasaran strategis:
 1. Persentase usulan masyarakat yang diakomodir melalui Musrenbang pada Dokumen Perencanaan Jangka Menengah
 2. Persentase usulan masyarakat yang diakomodir pada Dokumen Perencanaan Jangka Panjang
 3. Keselarasan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek
 4. Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam Pengambilan kebijakan pembangunan Daerah.
2. Disamping capaian kinerja sasaran strategis kinerja keuangan juga merupakan salah satu tolak ukur pencapaian kinerja Bapelitbang, dari jumlah dana yang dikelola sebesar Rp5.981.504.412,00 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat ribu empat ratus dua belas rupiah) dan terealisasi sebesar Rp4.986.379.015,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima belas rupiah) dengan capaian keuangan 83,36%. sehingga memperoleh predikat yang baik.

4.2 SARAN

Untuk peningkatan kinerja Bapelitbang di masa yang akan datang, akan dilakukan beberapa perbaikan dan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik dengan instansi vertikal maupun instansi koordinasi di atasnya dalam menyusun perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Meningkatkan SDM perencanaan baik kuantitas maupun kualitas khususnya Bapelitbang dan SDM perencana di seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA BUKITTINGGI**



BAHARYADI, SH
NIP. 19590929 198503 1 007

LAMPIRAN

TABEL PERJANJIAN KINERJA 2018

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir melalui Musrenbang pada Dokumen Perencanaan Jangka Pendek	100%	Penyusunan Rancangan Dan Pencapaian RKPD Kota Bukittinggi	74,886,500
				Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	56,276,940
				Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi 2018	46,894,500
		Persentase usulan masyarakat yang diakomodir pada Dokumen perencanaan Jangka Menengah	100%	Monitoring Dan Evaluasi RKPD Kota Bukittinggi	36,713,660
				Monitoring Dan Evaluasi Pokok-Pokok Pikiran Dprd	32,486,000
2	Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir pada Dokumen Perencanaan Jangka Panjang	100%	Evaluasi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021	478,000
				Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Daerah Tahun 2018-2021	86,237,500
				Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif	125,464,500
				Penyusunan Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Bukittinggi	169,062,850
				Penyusunan Revisi RP/PPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2021	156,421,820
		Keterselarasn Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek	100%	Koordinasi Pengelolaan DAK Tahun 2018	61,859,000
				Review Dan Sinkronisasi RP/PPD Kota Bukittinggi	40,598,450
				Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase Dan Sanitasi Perkotaan	77,729,500
				Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	64,374,500
				Koordinasi Pengelolaan Data AMPL Berbasis Rumah Tangga	60,291,000
		Keterselarasn Dokumen Perencanaan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Propinsi dan Daerah Tetangga	100%	Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi	29,257,400
				Koordinasi Pengelolaan Data Ampl Berbasis Rumah Tangga	2,318,400
				Koordinasi Bidang Perhubungan Komunikasi Dan Informatika	24,169,000
				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	127,117,620
				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	73,013,500
		Keterselarasn Dokumen Perencanaan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Propinsi dan Daerah Tetangga	100%	Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	127,110,700
				Koordinasi Dan Pendampingan Program Penataan Dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP)	22,435,500
				Penunjang Operasional Komisi Irigasi Kota Bukittinggi	16,930,450
				Fasilitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah	170,283,850
				Koordinasi Dan Pembinaan Kota Sehat	116,766,300

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
				Koordinasi Pengusutan Gender (PUG) Kota Bukittinggi	57,832,050
				Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (E-Planning)	62,320,500
				Updating Data Website Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIDP) Dan Forum Data	142,638,250
3	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi dalam penyusunan dokumen pembangunan daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan	90%	Penyusunan Kalender Penyelenggaraan Pemerintah	2,847,000
				Penyusunan E Data Base Perencanaan Pembangunan Kota Bukittinggi Berbasis GIS	2,120,000
4	Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan pembangunan	20	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian Dan Pengembangan	153,806,400
5	Meningkatnya Nilai SAKIP BAPELITBANG	Nilai Evaluasi AKIP	B		

**RENCANA DAN REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2018**

NO	URAIAN	ANGGARAN	OUTPUT			KEUANGAN			KINERJA KEGIATAN (% FISIK)	PERMASALAHAN
			INDIKATOR	TARGET	REALISASI	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN		
	BELANJA DAERAH	5,981,504,412.00				4,986,379,015.00	83.36	995,125,397.00	96.32	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,337,467,412.00				2,299,031,685.00	98.36	38,435,727.00	98.36	
	BELANJA LANGSUNG	3,644,037,000.00				2,687,347,330.00	73.75	956,689,670.00	94.28	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	772,530,760.00				658,332,692.00	85.22	114,198,068.00	97.92	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,750,000.00	Materai 3000, materai 6000, buku cek, biaya pos lainnya	250 lbr, 250 lbr, 3 buah, 1 ls	250 lbr, 250 lbr, 3 buah, 1 ls	2,450,000.00	89.09	300,000.00	100.00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59,600,000.00	Jasa komunikasi kantor, jasa sumber daya listrik	2 rekening telephone, 1 rekening listrik, 1 rekening speedy	2 rekening telephone, 1 rekening listrik, 1 rekening speedy	43,571,732.00	73.11	16,028,268.00	100.00	Pembayaran sesuai dengan kebutuhan
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	175,390,000.00	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	6 unit roda empat, 7 unit roda dua	6 unit roda empat, 7 unit roda dua	135,070,205.00	77.01	40,319,795.00	95.00	Pembayaran sesuai dengan kebutuhan
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	133,794,630.00	Jasa dan peralatan kebersihan kantor	1 paket, 6 item	1 paket, 6 item	130,995,500.00	97.91	2,799,130.00	100.00	
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11,500,000.00	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Komputer, Laptop, Printer, Periperal dan Peralatan/Perlengkapan Lainnya	Komputer, Laptop, Printer, Periperal dan Peralatan/Perlengkapan Lainnya	5,040,000.00	43.83	6,460,000.00	95.00	sesuai kebutuhan dan stock yang ada
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	21,458,930.00	Alat Tulis Kantor	32 item	32 item	12,237,250.00	57.03	9,221,680.00	90.00	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16,380,000.00	Penyediaan Barang cetakan	5 item, 1 ls	5 item, 1 ls	12,497,140.00	76.30	3,882,860.00	100.00	realisasi sesuai kebutuhan
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,996,990.00	Alat-alat listrik penerangan kantor	100%	95	600,000.00	12.01	4,396,990.00	95.00	realisasi sesuai dengan kebutuhan
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	21,996,000.00	Makan dan minum rapat, makan dan minum lembur, makan dan minum tamu yang disediakan	1 ls, 1 ls, 1 ls	1 ls, 1 ls, 1 ls	15,998,250.00	72.73	5,997,750.00	100.00	realisasi sesuai kebutuhan
10	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	254,500,000.00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	100%	234,820,415.00	92.27	19,679,585.00	100.00	
11	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	54,543,000.00	Terbayarnya iuran BPJS, tenaga sopir, tenaga caraka	1 ls	1 ls	54,539,700.00	99.99	3,300.00	100.00	
12	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	15,621,210.00	Pengadaan barang dan jasa terlaksana dengan baik	15 paket	5 Paket	10,512,500.00	67.30	5,108,710.00	100.00	Pembayaran honorarium PPHP, PPK dan PPBJ sesuai dengan jumlah paket Pengadaan
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	258,000,000.00				253,308,000.00	98.18	4,692,000.00	100.00	

NO	URAIAN	ANGGARAN	OUTPUT			KEUANGAN			KINERJA KEGIATAN (% FISIK)	PERMASALAHAN
			INDIKATOR	TARGET	REALISASI	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN		
13	Pengadaan Peralatan Kantor	115,000,000.00	Pemeliharaan gedung kantor	4 laptop, 3 komputer PC, 5 printer dan 1 router wireless	4 laptop, 3 komputer PC, 5 printer dan 1 router wireless	113,113,000.00	98.36	1,887,000.00	100.00	
14	Peningkatan Perlengkapan Kantor	143,000,000.00	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	3 Unit AC, 1 Smart TV, 1 set Microphone	3 Unit AC, 1 Smart TV, 1 set Microphone	140,195,000.00	98.04	2,805,000.00	100.00	
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	401,999,750.00				341,525,275.00	84.96	60,474,475.00	90.00	
15	Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencanaan & Peneliti	51,999,750.00	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat perencanaan dan penelitian	5 orang	2 orang	19,199,800.00	36.92	32,799,950.00	80.00	
16	Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan	350,000,000.00	Jumlah aparat perencanaan yang mengikuti Bimtek penyusunan dokumen perencanaan	80 orang	80 orang	322,325,475.00	92.09	27,674,525.00	100.00	
IV	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	498,120,820.00				311,632,005.00	62.56	186,488,815.00	90.00	
17	Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKPD Kota Bukittinggi	74,886,500.00	Penwako RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2019	1 Dokumen	1 Dokumen	50,163,907.00	66.99	24,722,593.00	100.00	Realisasi keuangan kurang dari 80% karena penghematan pada belanja cetak dan makan minum
18	Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD	56,276,940.00	Rumusan hasil musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, kota, provinsi dan nasional berdasarkan prioritas pembangunan kota	5 rumusan	5 rumusan	54,049,040.00	96.04	2,227,900.00	100.00	
19	Penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi 2018	46,894,500.00	Perwako perubahan RKPD Kota Bukittinggi tahun 2018	1 Dokumen	1 Dokumen	29,811,700.00	63.57	17,082,800.00	100.00	sisa anggaran pada belanja makan minum dan uang lembur
20	Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Bukittinggi	36,713,660.00	Laporan Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Bukittinggi	4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	26,489,960.00	72.15	10,223,700.00	90.00	Realisasi keuangan dibawah 80% karena penghematan pada belanja makan minum rapat akibat adanya penggabungan rapat evaluasi dengan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
21	Penyusunan Kalender Penyelenggaraan pemerintah	2,847,000.00	Kalender penyelenggaraan Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2018	1 Dokumen	1 Dokumen	2,847,000.00	100.00	-	100.00	
22	Koordinasi Pengelolaan DAK Tahun 2018	61,859,000.00	Laporan Money Pengelolaan DAK	4 Laporan	4 Laporan	47,605,430.00	76.96	14,253,570.00	100.00	

NO	URAIAN	ANGGARAN	OUTPUT			KEUANGAN			KINERJA KEGIATAN (% FISIQ)	PERMASALAHAN
			INDIKATOR	TARGET	REALISASI	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN		
23	Evaluasi RP JMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021	478,000.00	Dokumen Evaluasi RP JMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021	1 Dokumen	-	478,000.00	100.00	-	100.00	
24	Penyusunan Revisi RP JPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2021	156,421,820.00	Dokumen Revisi RP JPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2021	1 Dokumen	1 Dokumen	93,310,318.00	59.65	63,111,502.00	100.00	Penghematan pada belanja Akomodasi dan Sewa Ruang Rapat karena FGD yang direncanakan di Hotel dilaksanakan di Aula Bapelitbang
25	Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	29,257,400.00	Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi Kota Bukittinggi	1 Laporan	1 Laporan	2,297,400.00	7.85	26,960,000.00	100.00	Realisasi keuangan 7,85% karena kegiatan ini bersifat Mandatory, sampai akhir Desember 2018 acuan untuk pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan belum turun sesuai dengan yang tersebut dalam Pasal 13 Perpres No 54 Tahun 2018 tentang Aksi Pencegahan Korupsi yang terbit selambat-lambatnya 3 bulan setelah Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Pencegahan Korupsi ini diundangkan
26	Monitoring dan Evaluasi Pokok-pokok Pikiran DPRD Tahun 2018	32,486,000.00	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2018	1 dokumen	1 Dokumen	4,579,250.00	14.10	27,906,750.00	100.00	Kegiatan ini bersifat pendukung untuk kebutuhan Kegiatan Pokir dan sebagian besar sudah dibahas dalam penyusunan RKPD dan KUA PPAS
V	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	119,555,900.00				107,379,841.00	90.23	11,676,059.00	100.00	
27	Koordinasi Pengelolaan Data AMPL Berbasis Rumah Tangga	2,318,400.00	Laporan pengelolaan data AMPL berbasis Rumah Tangga (SABRT)	1 Laporan	1 Laporan	2,318,400.00	100.00	-	100.00	
28	Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman	39,508,000.00	Laporan pelaksanaan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman	1 laporan 1 tahun	1 laporan 1 tahun	35,365,450.00	89.51	4,142,550.00	100.00	

NO	URAIAN	ANGGARAN	OUTPUT			KEUANGAN			KINERJA KEGIATAN % FISIQ	PERMASALAHAN
			INDIKATOR	TARGET	REALISASI	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN		
29	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	77,729,500.00	Laporan pelaksanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan; Laporan pelaksanaan Implementasi dan Monitoring Dokumen SSK	2 Laporan	2 Laporan	70,195,991.00	90.31	7,533,509.00	100.00	
VI	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	252,582,120.00				166,999,949.00	66.12	85,582,171.00	100.00	
30	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	127,117,620.00	Laporan pelaksanaan rapat/koordinasi	1 laporan	1 Laporan	110,718,750.00	87.10	16,398,870.00	100.00	
31	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif	125,464,500.00	Dokumen perencanaan pengembangan ekonomi kreatif	1 dokumen	1 Dokumen	56,281,199.00	44.86	69,183,301.00	100.00	Sisa anggaran karena belanja perjalanan dinas luar daerah tidak dicairkan
VII	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	177,146,900.00				140,510,736.00	79.32	36,636,164.00	90.25	
32	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	73,013,500.00	Laporan koordinasi kegiatan bidang infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	65,128,501.00	89.20	7,884,999.00	100.00	
33	Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi	40,598,450.00	Dokumen review dan sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi	1 dokumen	1 Dokumen	36,311,800.00	89.44	4,286,650.00	100.00	
34	Koordinasi Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika	24,169,000.00	Laporan koordinasi Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1 Laporan 1 Tahun	1 Laporan 1 Tahun	23,394,550.00	96.80	774,450.00	100.00	
35	Koordinasi dan pendampingan program penataan dan pelestarian kota pusaka (P3KP)	22,435,500.00	Laporan pendampingan program penataan dan pelestarian kota pusaka	1 laporan 1 tahun	1 laporan 1 tahun	8,215,335.00	36.62	14,220,165.00	81.25	Bapelitbang tidak diundang saat rapat koordinasi tingkat Pusat
36	Penunjang Operasional Komisi Irigasi Kota Bukittinggi	16,930,450.00	Laporan pelaksanaan kegiatan Komisi Irigasi	1 Laporan	1 Laporan	7,460,550.00	44.07	9,469,900.00	70.00	Rapat Intern Komisi dan Pelantikan tidak jadi dilaksanakan karena SK baru ditetapkan tanggal 27 Desember 2018
VIII	Program Perencanaan Sosial Budaya	641,055,750.00				415,112,400.00	64.75	225,943,350.00	93.00	
37	Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	127,110,700.00	Laporan monitoring dan evaluasi pembangunan Bidang Sosial Budaya	1 Laporan	1 Laporan	97,310,511.00	76.56	29,800,189.00	90.00	Sisa anggaran berupa makan minum dan SPPD karena koordinasi secara intens dengan SKPD juga dilaksanakan melalui telepon tidak hanya melalui rapat

NO	URAIAN	ANGGARAN	OUTPUT			KEUANGAN			KINERJA KEGIATAN (% FISIK)	PERMASALAHAN
			INDIKATOR	TARGET	REALISASI	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN		
38	Fasilitasi Tim / Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah	170,283,850.00	Laporan kemajuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi	4 Triwulan	4 Triwulan	128,603,626.00	75.52	41,680,224.00	100.00	
39	Koordinasi Penguatan Gender (PUG) Kota Bukittinggi	57,832,050.00	Terlaksananya perencanaan penganggaran yang responsif gender serta meningkatnya kinerja pokok PUG	4 Triwulan	4 Triwulan	40,338,290.00	69.75	17,493,760.00	85.00	Pelaporan B12 dilaksanakan pada Bulan Januari
40	Penyusunan Strategis Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Bukittinggi	169,062,850.00	Dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah	1 Dokumen		73,694,531.00	43.59	95,368,319.00	100.00	
41	Koordinasi dan Pembinaan Kota Sehat	116,766,300.00	Laporan pelaksanaan kegiatan	1 Laporan	1 Laporan	75,165,442.00	64.37	41,600,858.00	90.00	Workshop yang direncanakan 2 hari dilaksanakan 1 hari saja sehingga serapan dana jadi kurang, namun tidak berpengaruh pada capaian Kegiatan
IX	Program Pengembangan Data / Informasi	207,078,750.00				56,772,750.00	27.42	150,306,000.00	81.67	
42	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning)	62,320,500.00	Dokumen perencanaan tingkat SKPD dapat terintegrasi dengan e-budgeting	3 Dokumen	3 Dokumen	12,252,800.00	19.66	50,067,700.00	45.00	Aplikasi diganti dengan SIMDA BPKP
43	Updating Data Website Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Forum Data	142,638,250.00	Data SIPD yang terpenuhi dan ter update	1 Dokumen	1 Dokumen	42,585,950.00	29.86	100,052,300.00	100.00	Realisasi Keuangan dibawah 80% akibat penghematan pada beberapa rincian objek belanja karena Bimbingan Teknis SIPD yang semula direncanakan oleh Narasumber pusat pada pelaksanaannya dengan Narasumber Provinsi sehingga terjadi penghematan pada Belanja Narasumber, Akomodasi dan Transportasi, demikian juga dengan belanja cetak dan perjalanan dinas terjadi penghematan karena dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

NO	URAIAN	ANGGARAN	OUTPUT			KEUANGAN			KINERJA KEGIATAN (% FISIK)	PERMASALAHAN
			INDIKATOR	TARGET	REALISASI	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN		
44	Penyusunan e-Database Perencanaan Pembangunan Berbasis GIS	2,120,000.00	Database Perencanaan Pembangunan Kota Bukittinggi berbasis GIS	1 Aplikasi	-	1,934,000.00	91.23	186,000.00	100.00	
X	Program Penelitian dan Pengembangan untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan	315,966,250.00								
45	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan	153,806,400.00	Laporan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan	1 Laporan	1 Laporan	133,993,716.00	87.12	19,812,684.00	100.00	
46	Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Daerah Tahun 2018-2021	86,237,500.00	Rencana Induk Kelitbangan Daerah Tahun 2018-2021	1 Dokumen	1 Dokumen	54,269,521.00	62.93	31,967,979.00	100.00	
47	Penguatan Inovasi Daerah	75,922,350.00	Tertaksananya sosialisasi PP Nomor 38 Tahun 2017	Jumlah peserta sosialisasi	80 orang peserta Sosialisasi	47,010,445.00	61.92	28,911,905.00	100.00	Penghematan pada belanja Narasumber yang semula direncanakan dari Pusat dan Provinsi pada pelaksanaannya dilaksanakan hanya oleh Narasumber Pusat
	JUMLAH	5,981,504,412.00				4,986,379,015.00		995,125,397.00		
	Rata-rata capaian Kinerja Belanja Langsung						73.75		94.28	
	Rata-rata capaian Kinerja Belanja						83.36		96.32	

Bukittinggi, 2 Januari 2019

KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



BAHARYADI, SH

NIP. 195909291985031007